

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang dialami masyarakat Indonesia menjelang akhir tahun 2021 telah menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi masyarakat maupun produsen. Kelangkaan dan peningkatan kuantitas tersebut merupakan akibat dari pelanggaran UU No. 7 Tahun 2014 tentang tindakan penimbunan. Temuan KPPU terkait aksi penimbunan produk tersebut akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan undang-undang yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin stabilitas dan meningkatkan efisiensi pasokan minyak goreng bagi penduduk Indonesia.

Penerapan harga eceran maksimum minyak goreng oleh pemerintah Indonesia dapat dianalisis dari berbagai perspektif, terutama dari perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Islam. Dalam upaya menghadapi kenaikan harga minyak goreng yang signifikan, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan, seperti menetapkan hingga mencabut harga eceran tertinggi dan subsidi minyak curah rakyat. Namun implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan.

Keputusan pemerintah untuk menetapkan dan menghapuskan harga eceran maksimum minyak goreng didasarkan pada tujuan menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat kendala dalam praktik pelaksanaan, termasuk praktik penimbunan dan spekulasi harga

yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng. Ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Islam memiliki pandangan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengontrol mekanisme pasar untuk menjaga keadilan dan menghindari kerusakan. Selaras dengan ajaran Islam, penetapan harga oleh pemerintah merupakan langkah untuk mengatasi ketidakadilan dan mencegah kerusakan dalam mekanisme pasar. Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa diharuskan kepada pemerintah untuk menetapkan harga suatu barang jika tujuannya agar merealisasikan keadilan di dalamnya serta dalam keadaan darurat.

Islam menganut keyakinan bahwa pemerintah atau penguasa mempunyai peran penting dalam menjamin keberlangsungan mekanisme pasar. Hal ini menekankan perlunya menjaga dan mencapai keadilan dan harmoni dalam pasar, sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepada pemerintah. Al-Quran dan Sunnah Nabi memberikan wawasan yang luas mengenai masalah ini, menjelaskan bahwa Islam menjunjung tinggi perlindungan hak-hak individu atas kehidupan, harta benda, dan martabat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan dan membatalkan harga eceran maksimum minyak goreng, dengan tujuan untuk menjamin aksesibilitasnya bagi seluruh warga negara Indonesia.

Adanya landasan kaedah dalam fiqih yang menetapkan

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah untuk rakyatnya berlandaskan kepada masalah” sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan dan mencabut harga eceran tertinggi tujuannya yakni meninjau masalah dan kebaikan rakyatnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang didapat perlunya bagi Masyarakat untuk tidak langsung mengklaim atas penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan lebih melihat tujuan dan masalah setiap aturan yang ditetapkan pemerintah.